



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : ANAK PERUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NATAL IMAN GINTING
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 169379

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	11.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	400.000.000
1. MOBIL, HYUNDAI IONIQ5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	500.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.823.500.550
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	619.121.300
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.715.000.000
Sub Total	Rp.	17.657.621.850
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.657.621.850

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.